

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya menjadi awal permasalahan penelitian ini dilakukan, setelah rumusan masalah yang dibangun melalui temuan data awal kemudian berlanjut pada pencarian data dengan menggunakan metode wawancara dan dukungan data dokumentasi, serta ,menggunakan analisis data berdasarkan konsepsi pemikiran Barbara Geddes yang menjadi pedoman dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa asumsi peneliti yang menitikberatkan pada persoalan politik birokrasi yang terjadi pasca kekosongan jabatan wakil bupati ini dengan adanya pengaruh kekosongan jabatan tersebut terhadap banyaknya kasus non job pada jabatan birokrasi yang keputusannya ada pada bupati sendiri selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) terhadap birokrasi dapat terjawab.

Bupati selaku PPK dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya yang hingga saat ini masih menjabat sendiri menimbulkan terjadinya politik birokrasi yang dilakukannya pada persoalan non job jabatan, walaupun keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian berada pada bupati namun kalau bupati didampingi oleh wakil bupati maka pertimbangan untuk melakukan non job jabatan ini bisa didiskusikan dan bisa mempertimbangkan saran dan masukan dari wakil bupati sendiri yang bertugas

sebagai pendamping bupati. Jika bupati hanya sendiri menjabat tentu akan sangat besar kemungkinan muatan unsur politik dalam hal non job ini. Kemudian berangkat dari pemikiran Barbara Geddes, yang menyatakan bahwa kepentingan bupati selaku pejabat politik yang memanfaatkan birokrasi untuk melakukan tiga kepentingan utama yakni, (1) Melanggengkan kekuasaan; (2) Menciptakan mesin politik yang loyal; dan (3) Mewujudkan efektifitas pemerintahan. Ketiga kepentingan yang dijelaskan oleh Geddes tersebut memang terbukti dilakukan oleh bupati secara tidak langsung pada pelaksanaan non job jabatan di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan tiga kepentingan bupati tersebut dalam melakukan non job jabatan, hanya terdapat dua indikator yang peneliti dapatkan dalam mendominasi kepentingan bupati secara pribadi. Pertama, kepentingan bupati untuk mempertahankan kekuasaan, ini dapat dilihat dari belum adanya pengisian jabatan untuk wakil bupati, mengingat bupati hanya didampingi selama setahun oleh wakil bupati, hal ini tentu menjadikan suatu indikasi adanya upaya untuk tetap mempertahankan kekuasaan yang akan dikuasai sendiri hingga masa jabatan selesai. Kedua, Menciptakan mesin politik yang loyal, hal ini menjadi kebutuhan utama Bupati agar dapat memenuhi kepentingan dalam mempertahankan kekuasaannya dan mewujudkan efektifitas pemerintahan karena sebagai pejabat politik yang berkuasa tentu membutuhkan dukungan sumber daya terkhususnya dari dalam birokrasi.

Berdasarkan banyaknya kasus non job jabatan yang dilakukan oleh bupati selaku PPK dan tidak adanya teguran dan keterangan lebih jelas yang

diperoleh oleh ASN yang menerima non job, sehingga ada indikasi prosedur dalam penempatan, pengangkatan dan pemberhentian ASN tidak sesuai dengan UU dan PP yang berlaku serta tidak adanya proses *job fit* yang terlebih dahulu dilakukan oleh bupati. Hal tersebut menjadikan salah satu bentuk politik birokrasi yang dilakukan oleh bupati. Namun dalam indikator mewujudkan efektifitas pemerintahan, peneliti beranggapan bahwa kepentingan ini belum dapat terjawab secara menyeluruh berdasarkan temuan data di lapangan ataupun dukungan data sekunder mengingat tidak adanya alasan dan penjelasan mengenai nonjob ASN yang diberlakukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah peneliti temukan di lapangan terkait bentuk politik birokrasi yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati maka terdapat saran dari peneliti untuk lebih memaksimalkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi sebagai sebuah pemikiran tentang kepentingan politisi dalam memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjutnya, peneliti merekomendasikan perlu dilakukannya penelitian lebih dalam mengenai permasalahan serupa dengan teori dan konsep yang berbeda dan lebih relevan, serta dibuktikan dengan lebih jelas guna untuk mendukung hasil penelitian.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan guna untuk mengevaluasi dan meninjau terlebih dahulu

terhadap keputusan yang akan dilakukan, serta untuk dijadikan bahan masukan untuk ASN di Kabupaten Dharmasraya agar tetap efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna dapat menunjukkan kinerja dan kapasitas yang dimiliki.

